

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13/2006 mengenai Standar Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umum disebutkan bahwa pengertian keuangan daerah ialah mengatur segala hak serta kewajiban yang ada di daerah pada rancangan pengurusan pemerintahan daerah yang nilai dan kewajibannya bisa dinyatakan dalam mata uang, termasuk seluruh kekayaan yang berkaitan dengan hak serta kewajiban daerah. Selain itu, Pasal 4 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, terbuka dan konsisten, serta mencermati keseimbangan, kepatuhan, dan harapan sosial.

Peraturan Pemerintah 71/2010 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang status/kondisi keuangan serta transaksi yang diimplementasikan entitas pelapor. Entitas pelapor ialah bagian pemerintah yang terdiri atas satu ataupun lebih entitas akuntansi. Menurut undang-undang, entitas akuntansi harus menyampaikan laporan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan umum, meliputi :

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat
- d. Organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lain, jika dipersyaratkan oleh undang-undang maka unit organisasi tersebut harus menyampaikan laporan keuangan

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Tujuan serta fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum adalah (Mardiasmo, 2009) :

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan agunan kepada pengguna serta lembaga resmi laporan keuangan yang berwenang, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ditentukan dan peraturan lainnya.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai wujud akuntabilitas pada masyarakat dan untuk memantau kemampuan dan menilai manajemen, sebagai dasar untuk mencermati kecenderungan selama periode ketika target yang telah ditentukan tercapai, serta membandingkannya dengan kinerja organisasi serupa lainnya

(jika ada). Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan jasa yang diterima, dan memungkinkan mereka untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan memberikan dasar kebijakan masa depan dan kegiatan perancangan yang direncanakan. Laporan keuangan digunakan untuk menyampaikan informasi pendukung tentang penggunaan dana yang sah.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan dapat mengakomodasi pembaca memutuskan apakah lembaga ataupun bagian kerja mampu terus mempersiapkan barang serta jasa di masa depan.

5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan memberikan peluang bagi lembaga untuk menyajikan maklumat pencapaian mereka kepada pengguna, karyawan dan masyarakat yang terkena dampak. Pelaporan keuangan merupakan sarana berkomunikasi bersama masyarakat dan kelompok terkait lainnya.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Tujuan laporan keuangan adalah untuk membagikan informasi pada pihak terkait yang mau mempelajari tentang organisasi.

Berdasarkan pada PP No. 71/2010, tujuan laporan keuangan pemerintah ialah untuk berbagi fungsi pengambilan keputusan dengan cara berikut serta memperlihatkan pertanggungjawaban entitas pelapor atas sumber daya yang diamanatkan kepadanya :

- a. Memberikan informasi tentang kondisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah
- b. Memberikan informasi tentang peralihan kondisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah
- c. Memberikan informasi tentang sumber, distribusi, serta penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Memberikan informasi tentang kepatuhan pengaktualan atas anggaran
- e. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor membiayai kegiatannya serta mencukupi keperluan kasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan sektor publik ialah memberikan informasi yang berfungsi untuk pengambilan keputusan serta memperlihatkan pertanggungjawaban entitas pelapor atas sumber daya yang diamanatkan. Membagikan agunan bagi pemakai laporan keuangan serta pemerintahan yang berwenang, yang menunjukkan bahwa manajemen sumber daya sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ditentukan dan peraturan lainnya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memantau kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar

untuk mengamati *trend* (kecenderungan) antara periode pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi sejenis lainnya. Memberikan dasar untuk kebijakan dan kegiatan perencanaan di masa depan. Membantu pembaca menentukan apakah organisasi atau unit kerja dapat terus menyediakan barang dan jasa di masa mendatang. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mempresentasikan pencapaian mereka kepada pengguna, karyawan, dan publik yang terkena dampak, sebagai sarana komunikasi dengan publik dan pihak terkait lainnya, dan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin memahami organisasi sektor publik.

2.1.2.1 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Komponen yang termasuk dalam kumpulan laporan keuangan antara lain laporan aktualisasi anggaran serta laporan keuangan, jadi komponennya adalah sebagai berikut (PP No. 71/2010) :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Memaparkan aktivitas keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengungkapkan kepatuhan atas APBN/APBD.

Laporan realisasi anggaran menguraikan sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah selama periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Untuk pos-pos berikut lebih disajikan komparatif dibandingkan periode sebelumnya : (1) Saldo Anggaran Awal; (2) Penggunaan Surplus Anggaran; (3) Surplus atau Kekurangan Dana Anggaran untuk Tahun Berjalan; (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan pada Periode Sebelumnya; (5) Lainnya; (6) Saldo Anggaran Akhir.

Selain itu, entitas pelapor membagikan makin banyak paparan tentang komponen yang termasuk pada laporan perubahan saldo anggaran lebih pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Menjelaskan status atau kondisi keuangan entitas pelapor yang berhubungan dengan asset (aktiva), kewajiban (hutang), serta ekuitas (modal) pada tanggal tertentu. Setiap elemen dijabarkan sebagai berikut :

- a) Aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah karena peristiwa masa lalu, yang diharapkan pemerintah serta masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi dan/atau sosial di masa depan, serta mampu dinilai pada unit keuangan, termasuk sumber daya. Pengeluaran non keuangan yang dibutuhkan untuk membagikan layanan pada publik dan sumber daya yang disajikan untuk pertimbangan sejarah serta budaya.

- b) Hutang, mengacu akibat peristiwa masa lalu, dan proses penyelesaian hutang akan membutuhkan sumber daya pemerintah.
- c) Modal merupakan asset bersih (*net worth*) pemerintah, yang menggambarkan perbedaan aktiva serta hutang pemerintah.

4. Laporan Operasional

Terkait LO, aktivitas usaha entitas pelapor dapat dinilai berdasarkan kategori ekonomi atau kategori rencana untuk menggapai target yang sudah diputuskan. Laporan keuangan melingkupi laporan operasional berikut : (1) Pendapatan (*Revenue*)–LO yang dihasilkan dari aktivitas operasional; (2) Beban (*Expenses*) dari aktivitas operasi; (3) Surplus/defisit dari aktivitas non operasi (jika ada); (4) Hal-hal luar biasa (jika ada); (5) Surplus atau defisit–LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas selama periode akuntansi, perubahan kas serta setaa kas selama periode akuntansi, serta kas serta setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk serta arus kas keluar dikategorikan menurut kegiatan operasi, investasi, pendanaan, serta transportasi.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Mencakup setidaknya hal-hal berikut : (1) Modal Awal; (2) Surplus atau defisit–LO; (3) Koreksi yang secara langsung

mengarah pada kenaikan atau penurunan modal, antara lain merupakan efek kumulatif dari pergantian prosedur akuntansi serta koreksi kesalahan dasar; (4) Modal Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan melingkupi definisi item-item yang ditampilkan pada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta laporan perubahan modal. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup penyajian informasi yang diperlukan serta direkomendasikan bagi SAP dan informasi lain yang dibutuhkan untuk penyajian laporan keuangan yang wajar, seperti liabilitas bersyarat (*contingent liability*) dan ikatan/kontrak lainnya.

Elemen laporan keuangan sektor publik melingkupi (Bastian, 2010) :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca merupakan laporan keuangan yang menerangkan keadaan atau kondisi asset, kewajiban serta ekuitas selama periode tertentu. Neraca mencakup setidaknya item berikut :

- a) Properti, pabrik dan peralatan
- b) Aktiva tidak berwujud
- c) Aktiva keuangan (kecuali item d,f, serta h)
- d) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- e) Persediaan

- f) Pemulihan non pertukaran, termasuk pajak serta transfer
- g) Piutang dari transaksi pertukaran
- h) Kas dan setara kas
- i) Utang pajak dan transfer
- j) Kewajiban yang timbul dari transaksi pertukaran
- k) Cadangan (*provision*)
- l) Kewajiban tidak lancar
- m) Partisipasi minoritas
- n) Asset/ekuitas neto

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus-Defisit)

Laporan kinerja keuangan juga dapat disebut laporan penghasilan serta pengeluaran. Laporan surplus-defisit merupakan laporan keuangan yang menunjukkan penghasilan serta pengeluaran dalam periode tertentu. Laporan surplus-defisit setidaknya melingkupi hal-hal berikut :

- a) Pendapatan dari aktivitas operasi
- b) Surplus/defisit dari kegiatan operasional
- c) Beban keuangan (beban utang)
- d) Surplus/defisit dari asosiasi dan ventura bersama dihitung berdasarkan metode ekuitas
- e) Surplus/defisit dari kegiatan normal
- f) Pos-pos luar biasa
- g) Surplus/defisit dari saham partisipasi minoritas
- h) Surplus/defisit dalam rentang waktu tersebut

3. Laporan Perubahan Aktiva /Ekuitas Neto

Menunjukkan bahwa menurut prinsip pengukuran tertentu yang digunakan, kenaikan atau penurunan kekayaan diutarakan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam asset bersih mewakili total surplus/defisit selama rentang waktu tertentu. Penghasilan serta biaya lain-lain langsung diakui sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto dari setiap penyertaan modal, dan dibagikan kepada pemilik. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto melingkupi :

- a) Kepemilikan dan pendapatan dibagi dengan pemilik
- b) Pada awal periode, saldo surplus/defisit kumulatif pada tanggal dan periode pelaporan
- c) Penyingkapan bagian asset/modal bersih secara terpisah, serta periksa jumlah buku setiap bagian asset/modal bersih pada awal dan akhir periode untuk menunjukkan adanya mutasi.

4. Laporan Arus Kas

Menampilkan informasi mengenai pendapatan serta pembayaran kas dalam periode tertentu. Pendapatan dan pembayaran kas dikategorikan berdasarkan aktivitas operasi. Aktivitas pendanaan, serta aktivitas investasi. Informasi arus kas berguna untuk pengguna laporan keuangan karena memberikan dasar untuk mengestimasi kemahiran entitas untuk menciptakan kas dan setara kas, dan kemahiran entitas untuk memanfaatkan arus kas tersebut.

5. Catatan atas Laporan Keuangan Sektor Publik

Merupakan bagian integral laporan keuangan dan memberikan informasi mengenai interpretasi item laporan keuangan untuk penyingkapan yang sesuai. Tujuan dari Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberitahukan penyingkapan yang diharuskan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa elemen laporan keuangan sektor publik antara lain Laporan Realisasi Anggaran yang memaparkan status atau kondisi keuangan entitas pelapor tentang kepatuhan atas APBN/APBD. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menunjukkan pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, saldo anggaran akhir serta lainnya yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Neraca menjelaskan status atau posisi keuangan entitas pelapor tentang asset, kewajiban, dan ekuitasnya pada tanggal tertentu. Berdasarkan klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi atau rencana, laporan operasional dan aktivitas operasional lembaga publik dapat dianalisis untuk mendapatkan target yang sudah ditetapkan. Laporan Arus Kas memberikan informasi tentang sumber dan penggunaan kas selama periode akuntansi, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi, serta kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. *Capital statement*

setidaknya menunjukkan item ekuitas awal, surplus atau defisit-LO pada periode yang relevan, koreksi yang secara langsung meningkatkan atau menurunkan ekuitas, termasuk dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan dasar, serta modal akhir. Catatan atas Laporan Keuangan yang melingkupi definisi nilai pos yang diusulkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.

2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan representasi dari informasi keuangan pemerintah daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Yadiati, 2007). Laporan keuangan ialah sistem pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh entitas (Nordiawan, 2008). Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting (Aliyah dan Anhar, 2012), dan pengungkapan informasi ini merupakan elemen penting dari transparansi fiskal serta akuntabilitas. Laporan keuangan yang dipublikasikan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar mampu dipadankan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Laporan keuangan sektor publik adalah gambaran tersusun dari situasi atau kondisi keuangan yang dihasilkan dari transaksi. Laporan keuangan organisasi sektor publik ialah bagian bermakna dalam membangun tanggung jawab bidang masyarakat. Meningkatnya permintaan akuntabilitas publik berdampak pada pengelolaan bidang masyarakat untuk menyampaikan informasi pada masyarakat, salah satunya ialah informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan sektor publik mewakili status atau kondisi keuangan atas transaksi yang dilaksanakan entitas bidang masyarakat. Tujuan pelaporan keuangan ialah untuk membagikan informasi tentang status atau kondisi keuangan, kemampuan serta arus kas suatu entitas, hal ini penting untuk beberapa pengguna untuk menyusun serta menilai ketentuan tentang distribusi sumber daya yang digunakan entitas dalam kegiatannya untuk mencapai tujuannya (Bastian, 2010).

Laporan keuangan adalah laporan terstruktur atas status atau posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan entitas pelaporan (PP No. 71/2010). Representasi laporan keuangan ialah representasi informasi keuangan pemerintah daerah yang mencukupi karakter kualitatif laporan keuangan.

Merujuk pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan ialah laporan yang menjabarkan semua transaksi keuangan yang dilakukan entitas baik bidang masyarakat dan swasta.

2.1.3.1 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik

Merupakan indikator normatif yang harus direfleksikan atau dilaksanakan dalam informasi akuntansi agar mampu mencapai targetnya (Nordiawan, 2008). Untuk mencapai taraf yang diinginkan, laporan keuangan pemerintah mencakup empat karakter sebagai berikut :

1. Relevan

Apabila informasi yang terkandung didalam laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan ketentuan pengguna dengan mendukung pengguna dalam menilai peristiwa masa lalu maupun saat ini, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasinya, laporan keuangan dianggap relevan. Selain itu, jika informasi disajikan secara tepat waktu dan lengkap dapat dikatakan relevan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahan besar, serta menyediakan setiap fakta yang benar dan dapat dikonfirmasi. Informasi tersebut mungkin bermakna, namun bila sifat atau penyampaiannya tidak mampu diandalkan, pengguna informasi tersebut mungkin menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan

Apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan

lainnya, maka informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut akan lebih berguna.

4. Dapat dipahami

Untuk memahami informasi yang diutarakan, pengguna dapat memahaminya didalam laporan keuangan serta mengungkapkannya dalam bentuk dan istilah yang sesuai untuk pemahaman pengguna. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa pengguna mempunyai keahlian yang cukup tentang aktivitas serta dunia kerja entitas pelaporan dan kesediaan pengguna untuk meneliti informasi yang relevan.

Ciri laporan keuangan merupakan ukuran normatif yang harus direfleksikan dalam informasi akuntansi agar mampu mencapai tujuannya. Karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu (PP No. 71/2010) :

1. Relevan

Relevan, yakni informasi yang terkandung di dalamnya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna dengan mendukung pengguna menilai kejadian masa lalu atau saat ini serta memperkirakan masa depan serta merevisi hasil evaluasi masa lalu mereka. Informasi yang relevan mempunyai elemen berikut :

- a. Manfaat umpan balik. Informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi bahwa cara tersebut merevisi perhitungan masa lalu mereka.

- b. Manfaat prediktif. Informasi mampu mendukung pengguna memperhitungkan masa depan berdasarkan hasil terdahulu serta peristiwa terkini.
- c. Tepat waktu. Informasi yang diberikan pada waktu yang tepat bisa berdampak serta berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Meliputi seluruh informasi akuntansi yang mampu mempengaruhi keputusan. Informasi di balik setiap informasi utama yang terdapat dalam laporan keuangan harus disampaikan dengan jelas, untuk mencegah penyalahgunaan informasi.

2. Andal

Artinya informasi yang terdapat pada laporan keuangan terhindar dari pemahaman yang menyimpangkan serta kecurangan besar, dan setiap fakta bisa dinyatakan dan dikonfirmasi dengan jujur. Informasi yang dapat dipercaya atau andal memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Penyajian jujur. Informasi tersebut benar-benar menjabarkan transaksi serta peristiwa lain yang semestinya atau dapat secara wajar diinginkan terjadi.
- b. Dapat dikonfirmasi. Informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan dapat dibuktikan, dan jika beberapa pihak telah melakukan pengujian atau pembuktian, hasilnya tetap menyatakan kesimpulan yang sama.

c. Netral. Informasi untuk kepentingan publik yang tidak kondusif atau adil untuk kepentingan aspek tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Artinya apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan mampu dibandingkan dengan laporan keuangan masa lalu ataupun laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Ini bisa dilakukan melalui perbandingan intern serta ekstern. Jika suatu perusahaan mengadopsi prosedur akuntansi yang sama setiap tahun perbandingan internal dapat dibuat. Apabila entitas yang dibandingkan menggunakan prosedur akuntansi yang sama, perbandingan eksternal bisa dibuat. Apabila kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas pemerintah lebih baik daripada kebijakan akuntansi saat ini, perubahan tersebut harus dilaporkan selama periode perubahan.

4. Dapat dipahami

Artinya informasi yang ditampilkan didalam laporan keuangan mampu dikuasai pengguna dan dapat disesuaikan dengan penangkapan pengguna. Maka dari itu, diasumsikan bahwa pengguna mempunyai pemahaman yang cukup tentang aktivitas serta dunia kerja entitas pelapor dan keinginan pengguna mendalami informasi yang relevan.

Bersumber pada informasi diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter kualitas laporan keuangan ialah relevan, laporan keuangan mampu mempengaruhi pertimbangan pengguna dengan

menilai kejadian terdahulu ataupun sekarang, mengestimasi masa depan serta mengkonfirmasi ataupun merevisi hasil penilaian, serta memberikan informasi secara tepat waktu serta lengkap. Andal, informasi laporan keuangan yang andal, terhindar dari pemahaman yang menjerumuskan serta pelanggaran besar, dan setiap fakta bisa dinyatakan dan diverifikasi dengan jujur. Dapat dibandingkan, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelapor lainnya. Dapat dipahami, bahwa informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup pemahaman pengguna.

2.1.3.2 Indikator Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Indikator penyajian laporan keuangan terdiri atas (Mulia, 2016) :

1. Relevan. Informasi yang terkandung di dalamnya mampu mempengaruhi pertimbangan pengguna dengan mendukung pengguna menilai kejadian terdahulu ataupun sekarang serta memperkirakan masa depan juga memperbaiki hasil penilaian masa lalu mereka.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan terhindar dari pemahaman yang menjerumuskan serta pelanggaran besar, dan setiap fakta dinyatakan dengan jujur dan dapat diverifikasi.
3. Dapat dibandingkan. Apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun laporan keuangan entitas

pelaporan lainnya, maka informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut akan lebih bermanfaat.

4. Dapat dipahami. Informasi yang ditampilkan didalam laporan keuangan mampu dikuasai pengguna serta dapat diungkapkan dalam bentuk dan istilah yang disinkronkan dengan pengetahuan pengguna.

2.1.4 Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar (Bandariy, 2011).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan salah satu cara agar seseorang dapat dengan mudah mendapat informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006). Permendagri No. 21/2010 menyebutkan bahwa pemerintah daerah mesti memberi kewenangan atau akses untuk menghasilkan laporan keuangan kepada *stakeholder*, contohnya dengan menerbitkan laporan keuangan daerah menggunakan internet, koran, ataupun sarana lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan ialah keluasaan membuka serta mendapat informasi laporan keuangan yang disusun satuan pemerintah.

Keterbukaan informasi publik dapat dilihat pada UU No. 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, pada pasal 2 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Berdasarkan Sande (2013) yang sebanding dengan Permendagri No. 13/2006, pemerintah daerah harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Transparansi. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah diterbitkan menggunakan media
2. Kemudahan. Pemerintah daerah harus membagikan kemudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapat informasi atas laporan keuangan daerah
3. Dapat diakses. Publik dapat membuka laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan internet

Permendagri No. 3/2017 mengenai pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah ditujukan untuk : (1) Merealisasikan *good governance* yakni pemerintahan yang terbuka, efektif, realistis, akuntabel dan bertanggung jawab; (2) Meningkatkan manajemen serta layanan informasi serta dokumentasi oleh Kementerian Dalam Negeri serta

pemerintah daerah untuk menyediakan layanan informasi serta dokumentasi bermutu tinggi.

Secara keseluruhan, perkembangan terakhir perumusan regulasi pemerintah pusat untuk membantu transparansi informasi publik pemerintah pusat dan daerah sangat terlambat. Dengan tersedianya informasi untuk publik, penyelenggaraan pemerintahan dapat berfungsi dengan baik dan dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

2.1.4.1 Indikator Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan dipengaruhi oleh 3 indikator berikut (Mulia, 2016) :

1. Terbuka di media massa

Laporan keuangan diterbitkan secara transparan dalam media, sehingga pengguna laporan keuangan (khususnya pihak eksternal) bisa melihatnya secara tepat.

2. Mudah diakses

Pengguna eksternal bisa mengakses informasi laporan keuangan menggunakan internet.

3. Ketersediaan informasi

Informasi laporan keuangan yang dipublikasikan secara menyeluruh diserahkan kepada pengguna yang memerlukan laporan keuangan ini.

2.1.5 Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berhubungan dengan evaluasi pengguna laporan keuangan atas tanggung jawab serta keterbukaan setiap laporan keuangan yang disampaikan pemerintah (Saputra, 2012). Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah menjadi tanggung jawab Perda dalam manajemen keuangan daerah, dengan cara menampilkan laporan keuangan ke media secara transparan serta kredibel, berbagai pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dengan asumsi masyarakat berwenang mendapat informasi tersebut (Aliyah serta Nahar, 2012). Laporan keuangan daerah dirancang untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta laporan akuntabilitas itu sendiri. Sasaran yang lebih penting dalam pelaporan ialah kepuasan pengguna informasi (Bandariy, 2011). Menurut Deniski (1973) dalam Sujana (2002), disebut sebagai *Impossibility Theory*, pengguna informasi laporan keuangan memiliki berbagai macam jenis kepentingan, sehingga sangat sulit untuk menyusun informasi untuk memuaskan semua jenis pengguna.

Guna memuaskan pengguna informasi, mesti kerja keras untuk menelusuri informasi apa saja yang diperlukan pengguna laporan keuangan daerah. Untuk organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan pelaporan keuangan adalah (Mardiasmo, 2002) :

1. Menyampaikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, politik serta sebagai bukti akuntabilitas dan manajemen.
2. Menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja manajerial serta organisasi.

Secara rinci, tujuannya adalah :

1. Menyediakan informasi keuangan untuk memutuskan serta memperkirakan arus kas, saldo neraca, serta kebutuhan sumber daya keuangan jangka pendek departemen pemerintah.
2. Menyampaikan informasi keuangan untuk memutuskan serta memperkirakan keadaan ekonomi departemen pemerintahan dan perubahannya.
3. Menyampaikan informasi keuangan untuk memantau kinerja, mematuhi hukum dan peraturan, kontrak yang dinegosiasikan, serta peraturan lain yang diperlukan.
4. Menyampaikan informasi untuk perancangan serta penaksiran dan untuk memperkirakan dampak akuisisi serta alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Menyampaikan informasi untuk menilai manajemen dan kinerja organisasi.

Laporan keuangan pemerintah ialah salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui laporan keuangan pemerintah. Pengguna informasi keuangan yang berbeda memiliki tingkat kepuasan yang

berbeda pula, yang akan menimbulkan keperluan informasi yang berbeda, sehingga menimbulkan benturan kepentingan. Menurut Mardiasmo (2002), keperluan informasi pengguna laporan keuangan Perda bisa disingkat sebagai berikut :

1. Pengguna layanan masyarakat memerlukan informasi tentang biaya, harga, serta kualitas layanan masyarakat yang disampaikan.
2. Wajib pajak masyarakat serta pemberi bantuan hendak melihat keberadaan penggunaan tertentu.
3. Kreditor serta investor memerlukan informasi untuk memperkirakan tingkat risiko, likuiditas, serta solvabilitas.
4. Parlemen serta organisasi politik membutuhkan informasi keuangan untuk menjalankan fungsi pengawasan serta menghindari laporan yang bias dalam hal status keuangan pemerintah, serta penyelewengan keuangan Negara.
5. Pengelola publik memerlukan informasi akuntansi sebagai bagian integral dari sistem informasi manajemen untuk menopang perencanaan serta pengendalian organisasi, evaluasi kinerja, serta interkoneksi dengan organisasi serupa lainnya dari waktu ke waktu.

2.1.5.1 Indikator Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Menurut Mulia (2016) indikator penyajian laporan keuangan meliputi :

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2005) transparansi bermakna keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terpaut aktivitas manajemen sumber daya masyarakat pada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Pertimbangan transparansi adalah bahwa publik memiliki hak untuk secara terbuka serta sepenuhnya memahami tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan kepadanya serta mematuhi peraturan perundang-undangan (SAP, 2005), sehingga dapat menyampaikan informasi keuangan yang transparan serta jujur pada publik. Transparansi adalah akses bebas kegiatan politik dan ekonomi serta keputusan pemerintah. Transparansi memungkinkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui struktur serta fungsi pemerintah, tujuan dari kebijakan serta rencana fiskal, dan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa kaitannya dengan transparansi, masyarakat mempunyai hak kepada pemerintah yakni :

- 1) Hak untuk memahami, yaitu :
 - a. Memahami kebijakan pemerintah
 - b. Memahami ketentuan pemerintah
 - c. Memahami alasan penerapan kebijakan serta ketentuan tertentu.

2) Hak untuk diberi informasi, yang melingkupi hak untuk diberi penjelasan secara transparan atas isu yang menjadi perdebatan publik

3) Hak untuk mengungkapkan keinginan mereka. Pelaporan keuangan pemerintah ialah hak publik yang wajib disampaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hak publik untuk memperoleh informasi keuangan merupakan hasil dari rancangan tanggung jawab publik. Akuntabilitas publik mengharuskan organisasi publik menyediakan laporan keuangan sebagai bukti akuntabilitas serta manajemen.

Transparansi didasarkan pada kebebasan mengakses informasi yang dibutuhkan publik. Artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002). Transparansi berarti tidak hanya menghasilkan laporan tahunan, tapi juga terbuka serta dapat diakses oleh publik, sebab kegiatan pemerintahan dilakukan dalam lingkup tugas masyarakat.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2010), akuntabilitas dapat diartikan sebagai penyampaian pertanggungjawaban atau tanggapan kepada pihak yang berhak atau berhak meminta informasi atau

pertanggungjawaban, menjelaskan kinerja serta perilaku individu/badan/hukum/pimpinan kolektif atau organisasi. Akuntabilitas bertanggung jawab atas manajemen sumber daya dan implementasi kebijakan yang diamanahkan pada entitas pelaporan untuk memperoleh tujuan yang ditentukan secara teratur (Nordiawan, 2008).

Sistem akuntabilitas keuangan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam manajemen keuangan daerah, menyajikan laporan keuangan yang transparan serta jujur pada masyarakat melalui media, dan laporan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak terkait (Wahida, 2015). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009), pertanggungjawaban atau akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk mengungkapkan semua aktivitas kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai hak serta kewenangan untuk menuntut tanggung jawab tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah pada publik, yaitu pembukuan, penyajian, pelaporan serta pengungkapan semua kegiatan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama / Tahun	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah	Safitri Ratna Amelia / 2009	Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan Variabel Dependen : Penggunaan informasi keuangan daerah	Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan secara signifikan positif berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
2.	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (studi pada	Himmah Bandariy / 2011	Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan Variabel Dependen : penggunaan	Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

	Kabupaten eks Karesidenan Banyumas)		informasi keuangan daerah	Aksesibilitas laporan keuangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
3.	Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Peggy Sande / 2013	Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan Variabel Dependen : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4.	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (studi kasus pada pemerintahan Kota Pekanbaru)	Fera Maydia Sari / 2015	Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah Variabel Dependen : Penggunaan informasi keuangan daerah	Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.
5.	Pengaruh penyajian laporan	Salomi J. Hehanussa / 2015	Variabel Independen : Penyajian laporan	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian

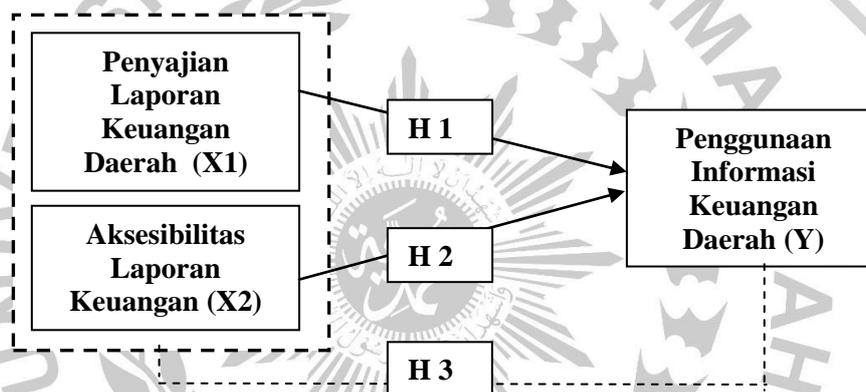
	keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon		keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah Variabel Dependen : Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
6.	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah (studi empiris di Kota Baubau)	Waode Alnur Mulia / 2016	Variabel Independen : Penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan daerah Variabel Dependen : Penggunaan informasi keuangan daerah	Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono,2013). Kerangka konseptual bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka dari variabel yang akan diteliti.

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, maka tersusun kerangka pemikiran yang disajikan pada gambar sebagai berikut : Penelitian ini melibatkan dua (2) variabel independen dan satu (1) variabel dependen. Variabel independen meliputi penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan, sedangkan variabel dependen adalah penggunaan informasi keuangan daerah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini tercermin dalam gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Keterangan :

- > : Hubungan Parsial
- - - - -> : Hubungan Simultan

Keterangan Gambar :

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan hubungan variabel independen secara parsial yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X_1), untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap penggunaan

informasi keuangan daerah (Y). Dan juga untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan (X_2) terhadap variabel dependen yaitu penggunaan informasi keuangan daerah. Selanjutnya untuk mengetahui secara bersama-sama atau simultan kedua variabel independen mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen.

Laporan keuangan organisasi sektor publik menjadi bagian penting dalam membangun akuntabilitas sektor publik. Meningkatnya permintaan akan pelaksanaan akuntabilitas publik berdampak pada pengelolaan informasi yang diberikan pada publik oleh sektor publik, salah satunya ialah informasi akuntansi dalam bentuk laporan (Mardiasmo, 2009).

Undang-Undang Nomor 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103 menyebutkan bahwa informasi yang terdapat didalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan data publik yang mampu dipahami, diakses, serta diperoleh masyarakat.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam pembentukan sistem pertanggungjawaban manajemen keuangan daerah. Perda mesti mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum serta memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kian baik penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah kian jelas, hal ini dikarenakan seluruh transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disampaikan secara utuh serta jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah (Sande, 2013).

Demokrasi terbuka bisa diwujudkan menggunakan media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi serta *website* yang dapat membagikan animo ataupun mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab pada publik (Mulyana, 2006).

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Laporan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan daerah menjadi faktor penting dalam pembentukan sistem pertanggungjawaban manajemen keuangan daerah. Perda mesti mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum serta memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan maka laporan keuangan pemerintah daerah semakin jelas, hal ini dikarenakan seluruh transaksi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disampaikan secara utuh serta jujur dalam laporan keuangan Perda sehingga penggunaan informasi keuangan daerah akan meningkat dan juga akan mempengaruhi penilaian publik (Sande, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bandariy (2011), mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penggunaan informasi laporan keuangan oleh pengguna informasi. Hasil penelitian

Bandariy (2011) sejalan dengan yang dilakukan oleh Mulia (2016), dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan dukungan teoritis serta bukti empiris di atas, maka bisa dibuat hipotesis :

H_{01} : Penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah

H_{a1} : Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah

2.4.2 Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Penggunaan informasi yang efektif bergantung pada akses publik ke laporan pertanggungjawaban ataupun laporan hasil survei yang mampu dibaca serta dipahami. Didalam demokrasi yang terbuka, media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, serta *website* menyediakan akses yang mendorong penggunaan informasi laporan keuangan daerah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006). Kemudahan dalam mengakses bagi pengguna informasi laporan keuangan mesti dilakukan oleh pemerintah. Apalah artinya menyampaikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna informasi laporan keuangan daerah. Sehingga pemerintah selain menyajikan laporan keuangan juga harus

memberikan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memberikan fasilitas kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bandariy (2011) menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara signifikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Selanjutnya, hasil penelitian Mulia (2016) juga menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah maka penggunaan informasi keuangan daerah akan semakin baik.

Berdasarkan dukungan teoritis serta bukti empiris di atas, maka bisa dibuat hipotesis :

H_{02} : Aksesibilitas Laporan Keuangan Tidak Berpengaruh Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

H_{a2} : Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

2.4.3 Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat berbentuk laporan keuangan dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Selain menyediakan laporan keuangan, pemerintah daerah juga harus memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan. Alasannya, apalah artinya menyampaikan laporan keuangan tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka upaya untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan daerah tidak dapat mencapai hasil yang terbaik. Karena penyajian atau penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyana (2006) menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan

aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan semakin mudah maka penggunaan informasi keuangan daerah akan semakin baik.

Berdasarkan dukungan teoritis serta bukti empiris di atas, maka bisa dibuat hipotesis :

H_{03} : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah

H_{a3} : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah